

PROFESIONALISME MILITER DI KOREM 032 WIRABRAJA SUMATERA BARAT

Inoki Ulma Tiara

Prodi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang
inokiulmatia@gmail.com

ABSTRACT

Together with national reformation, Indonesian national military has been realized with the need of doing professionalism. Professionalism inside of national army has become consciousness and commitment of Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), especially Indonesian army ground forces (TNI AD). TNI as organization which defense the country is hoped more advance and modern. In democraton country, the duty of TNI and the army has been described clearly, that is old professionalism which is only at defense aspect. This research is for understanding of TNI professionalism in Korem 032 Wirabaja West Sumatera. Based on data analysis, it shows that the response to the military professionalism inside of TNI is very good. The effect of response of professionalism of military inside of TNI AD at Korem 032 Wirabaja West Sumatera has been occured directly that make professional aspect clearly. The duty of TNI AD at Korem 032 Wirabaja is only on defense aspect.

Keywords: *Democracy, military, defense, professionalism*

ABSTRAK

Bersama dengan reformasi nasional, militer nasional Indonesia telah diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan profesionalisme. Profesionalisme dalam tentara nasional telah menjadi kesadaran dan komitmen dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pasukan darat militer terutama Indonesia (TNI AD). TNI sebagai organisasi pertahanan yang negara diharapkan lebih maju dan modern. Di negara demokrasi, tugas TNI dan tentara telah digambarkan secara jelas, yaitu profesionalisme lama yang hanya pada aspek pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami profesionalisme TNI di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon terhadap profesionalisme militer dalam TNI sangat baik. Pengaruh respon profesionalisme militer dalam AD TNI di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat telah terjadi secara langsung yang membuat aspek profesional secara jelas. Tugas TNI AD di Korem 032 Wirabaja hanya pada aspek pertahanan.

Kata Kunci: *Demokrasi, militer, pertahanan, profesionalisme*

A. Pendahuluan

Naskah ini lahir berawal dari keter-tarikan terhadap pemerintahan Orde Baru (Orba) dalam menciptakan dan

mempertahankan kekuasaanya. Diper-mukaan pemerintahan Soeharto be-gitu stabil, nyaman, dan tenteram

hampir tanpa gejolak, sehingga hari ini sebahagian masyarakat di Indonesia melihat zaman pemerintahan Soeharto masih lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelum dan sesudahnya¹. Reformasi akhirnya membuka seluruh kebobrokan Soeharto yang tidak nampak permukaan tersebut, termasuk kekuatan yang paling menyokong kekuasaan Soeharto yaitu militer, sehingga tuntutan profesionalisme militer adalah salah satu isu utama setelah reformasi.

Penulis berpandangan bahwa tujuan menjadikan TNI menjadi militer yang profesional bukanlah disandarkan pada keinginan zaman atau hukuman terhadap kesalahan masa lalu. Ketika profesionalisme militer lahir di dua hal di atas maka profesionalisme militer seperti datang tiba-tiba. Tetapi profesionalisme militer harus didasarkan pada konsep dan tahapan yang jelas. Sehingga konsep profesionalisme militer yang ditawarkan Samuel Huntington tentang *old professionalism* yang tergambar dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dilaksanakan secara terencana oleh negara yang pada akhirnya melahirkan profesionalisme TNI yang matang dan terukur.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan usia yang telah mencapai lebih dari setengah

abad, TNI mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya sebagai tentara profesional.

Dalam negara demokrasi profesionalisme militer diartikan peran militer (tentara) dibatasi pada pelaksanaan perintah di bidang pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri (keadaan darurat) di bawah supremasi sipil.² Adanya supremasi sipil mengharuskan militer mengabdikan diri secara profesional pada keputusan-keputusan politik sipil. Sebagai alat negara, militer harus di bawah kendali dan kontrol masyarakat sipil. Institusi militer hanyalah menjadi agen operasional atau pelaksana efektif di lapangan, yang diikuti pula oleh mekanisme pertanggungjawaban ke publik secara transparan. Cara kontrol demikian, tentu saja tetap mempertimbangkan pada prinsip penghargaan atas otoritas profesionalisme yang diberikan kepada kemandirian militer.

Secara historis ada tiga peristiwa penting yang menjadikan TNI merasa lebih berjasa dan tidak berada di bawah otoritas sipil. *Pertama* adalah revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949. Pada revolusi fisik ini, perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh TNI diklaim sebagai saham terbesar mereka ketika mendirikan negara Indonesia. *Kedua* adalah saat pemberontakan muncul di berbagai daerah pada dekade 50-an. Keberhasilan TNI untuk membungkam pemberontakan-pemberontakan tersebut melalui operasi militer diklaim

¹ Indo Barometer. 2011. *Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono*. Jakarta: Indo Barometera.

² Salim Said. 2006. *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Surya Multi Grafika.

sebagai saham penting TNI untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. *Ketiga*, keberhasilan TNI menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G 30 S/PKI semakin memperbesar saham TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dari ketiga peristiwa penting tersebut, keberadaan TNI yang berada di garis depan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan mendapatkan legitimasi.

Faktor historis tersebut membuat Indonesia belum memiliki pengalaman otentik bagaimana sistem politik secara substansial menempatkan posisi tentara dalam kerangka subordinasi sipil; apalagi dalam bentuk kontrol efektif sebagaimana diberlakukan pada negara demokratis. Bahkan, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Militerlah yang cenderung mendominasi *civil society*. Ini dapat dirunut dari pengalaman panjang dari masa revolusi kemerdekaan dan semakin intens ketika Orde Baru berkuasa.

Kebijakan negara Indonesia untuk membentuk TNI menjadi militer profesional di bawah supremasi sipil sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin, militer ditempatkan dalam posisi alat negara di bawah kendali pemerintah sesuai dengan supremasi sipil³. Namun, militer berpandangan kebijakan tersebut tidak realistis mengingat proses lahir dan tumbuhnya TKR yang menganggap dirinya sebagai alat

perjuangan rakyat dan bukannya sebagai alat negara belaka di bawah kendali pemerintah⁴.

Kegagalan kebijakan profesional militer di bawah supremasi sipil di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik, karena militer profesional muncul di dalam sistem politik yang stabil. Dinamika politik nasional yang kacau menciptakan perspektif dikalangan militer untuk turut campur dalam politik praktis dan keraguan terhadap kepemimpinan kaum sipil maupun terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Di sisi lain gagalnya kebijakan profesional militer di bawah supremasi sipil militer di Indonesia adalah karena militer digunakan untuk mempertahankan kekuasaan oleh rezim yang berkuasa. Pada masa Sukarno, militer diakui sebagai kekuatan politik dalam lembaga negara (Dewan Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melibatkan TNI dalam politik dengan membiarkan berlangsungnya proses *balance of power* antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu yakni TNI dan PKI. Meletusnya peristiwa “Gerakan 30 September” pada tanggal 1 Oktober 1965, merupakan suatu *turning point* dalam perkembangan politik nasional Indonesia memperkuat posisi dan kelanggengan dominasi politik tentara dalam sistem politik nasional.

³ Reid J.S Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya.

⁴ Soebijono. 1997. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Begitu pun dengan pemerintahan Orde Baru, militer ditempatkan pada kedudukan yang istimewa sebagai motor pembangunan dan atas penilaian ketidakmampuan sipil. Di bawah kendali Soeharto yang menempatkan militer pada tempat spesial baik atas dasar ikatan psikologis ataupun keyakinan atas militer sebagai salah satu keistimewaan yang diberikan kepada militer adalah menempatkannya pada posisi strategis pemerintahan dalam konsep dwifungsi ABRI, dimana angkatan bersenjata dilihat secara sah sebagai kekuatan militer dan sosial-politik dimana kekuatan sosial-politiknya dikukuhkan secara legal.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru mendorong reformasi di semua lini, termasuk mereformasi ABRI yang selama ini menjadi alat dan bagian dari kekuasaan. Berbagai tuntutan bermunculan agar TNI kembali ke barak.⁵ yang disebabkan praktik-praktik otoriterisme secara massif semasa Orde Baru dimana militer merupakan "mesin resmi" kekerasan negara. Tidak mengherankan jikalau momentum ledakan perlawanan masyarakat atas praktik kesewenang-wenangan mengawali gerakan reformasi politik beberapa tahun berikutnya, senantiasa menempatkan sasaran utama pada sikap dan perilaku militer.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dimulai rintisan kebijakan untuk "menghalau" militer dari arena politik praktis, karena

alasan mendasar perlunya institusi militer untuk kembali pada fungsi utamanya dan memperbaiki kembali konsep hubungan sipil-militer dengan lebih mengedepankan pada supremasi sipil. Kebijakan tersebut diantaranya strategi untuk pemisahan antara militer dengan kepolisian, yang dilandasi oleh perbedaan substansial posisi dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Carut-marutnya posisi keduanya menyebabkan hancurnya profesionalisme yang semestinya diemban oleh kedua institusi tersebut. Tentara, yang sesungguhnya hanya memiliki wilayah pertahanan negara ternyata merasuki area keamanan yang merupakan otoritas kepolisian. Sebaliknya pula, kepolisian yang semestinya merupakan kekuatan sipil malahan mengalami militerisasi. Upaya-upaya membatasi ruang militer sebelumnya juga diawalinya dengan proses sipilisasi institusi pertahanan, dimana secara simbolis diwujudkan dalam bentuk pengisian jabatan menteri pertahanan dari kalangan sipil. Perubahan-perubahan kebijakan negara untuk membangun militer yang profesional membawa dampak terhadap militer secara keseluruhan, yakni meliputi komando kewilayahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Korem 032/Wirabaja yang berada di bawah Kodam I/ Bukit Barisan sebagai basis kekuasaan tentara (AD) TNI penyelenggaraan pertahanan untuk wilayah Sumatera Barat yang membawahi 10 Kodim dan 2 Bataliyon.⁶ Profesionalisme

⁵ Asren Nasution. 2003. *Religiositas TNI Refleksi Pemikiran Jenderal Besar Soedirman*. Jakarta: Prenada Media.

⁶ Korem 032/Wirabaja adalah hasil penggabungan 2 (dua) Korem sebelumnya yaitu Korem 032/Wirabaja yang berkedudukan

militer pada tatanan implementasinya di Korem 032 Wirabaja menunjukkan perubahan-perubahan signifikan sekitar organisasi TNI khususnya Angkatan Darat sebagai proses dialektika prajurit angkatan Darat dalam memaknai profesionalisme.⁷

Dengan demikian penelitian tentang profesionalisme militer menarik untuk dilakukan karena: *pertama*, profesionalisme merupakan karakteristik militer yang paling utama. Terwujudnya TNI profesional, akan membawa dampak terhadap kemampuan TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional. *Kedua*, perjalanan sejarah militer begitu kompleks sehingga masih banyak celah dan ruang yang belum diteliti, baik secara nasional maupun secara kedaerahan. *Ketiga*, profesionalisme militer merupakan isu-isu populer dalam wacana hubungan sipil-militer dalam demokrasi di Indonesia. Dalam permasalahan penelitian penulis terfokus pada *pertama* bagaimana pola pemahaman

di Bukittinggi dan Korem 033/Wirayudha yang berkedudukan di Solok. Keputusan Kasad No. Kep/30/I/1985 tanggal 22 Januari 1985 dan surat perintah Pangdam III/17 Agustus No. Sprin/91/I/1985 tanggal 23 Januari yang Makoremnya berkedudukan di Kota Madya Padang. Mulai saat itu resmiah berdirinya Korem 032/ Wirabaja yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Pangdam III/17 Agustus yang kemudian dilikuidasi ke dalam Kodam I Bukit Barisan.

⁷ Kusnanto Anggoro. 2008. *Pengantar Profesionalisme Militer, Profesionalisasi TNI*. Malang: UMM Press.

para perwira di Korem 032 Wirabjadi Sumatera Barat tentang tuntutan profesionalisme militer dalam jajaran kesatuan mereka; *Kedua* bagaimana hambatan-hambatan profesionalisme militer di Korem 032 Wirabaja Sumatera Barat; *Ketiga* apa langkah-langkah yang diambil oleh para perwira di Korem 032Wirabaja tersebut dalam menjawab tuntutan reformasi militer; *Keempat* bagaimana karir perwira militer Angkatan Darat putra Sumatera Barat di tingkat nasional.

B. Tinjauan Kepustakaan

Dalam artikel ini teori yang digunakan untuk memahami militer dan profesionalisme militer secara konseptual adalah kerangka teori utama Samuel Huntington yang berprinsip bahwa profesionalisme militer yaitu fungsi militer hanya untuk pertahanan semata dan berada di bawah supremasi sipil, biasa disebut dengan profesionalisme lama (*Old Professionalism*). Personel militer yang menjadi bahasan adalah perwira menengah seperti yang disampaikan Huntington dalam Perlmuter⁸ yang menyatakan bahwa perwira profesional di zaman modern merupakan satu kelas sosial yang baru mempunyai ciri-ciri dasar berikut:

1. Keahlian (manajemen kekerasan)
2. Pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara),
3. Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi dan)
4. Ideologi (“semangat militer”)

⁸Perlmuter, Armos. 1985. *Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dalam melakukan pemaknaan terhadap profesionalisme militer dari kacamata militer, penulis menggunakan teori kontruksi sosial, yaitu dalam dua realitas yaitu realitas objektif dan realitas subjektif sebagai proses internalisasi dan eksternalisasi, seperti disampaikan Berger⁹ berpendapat realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhi melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Berger melihat masyarakat (Korem 032 Sumbar sebagai unit sosial) sebagai produk manusia, dan manusia (perwira menengah) sebagai produk masyarakat.

1. Realita objektif: realita objektif yang terbentuk melalui eksternalisasi kembali membentuk manusia dalam masyarakat contohnya adalah undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
2. Realita subjektif: Undang-undang nomor 34 tentang TNI yang diberikan oleh negara kepada TNI tidak terserap sempurna sehingga individu atau perwira menengah daerah resort militer 032 dan menginterpretasikan sendiri aturan-aturan yang telah ditetapkan.

C. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, maka penelitian ini

⁹ Dalam Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu alasan penting untuk melakukan penelitian kualitatif adalah bersifat penyelidikan dan subjek penelitian yang diteliti sesuatu yang menarik dan belum banyak mendapat perhatian dari peneliti-peneliti lain, dan peneliti harus mendengar informasi dan membuat gambaran berdasarkan keterangan informan. Pendekatan ini digunakan agar dapat memahami lebih luas tentang profesionalisme militer di Sumatera Barat.

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen¹⁰. Penelitian ini dilakukan di Korem 032 Wirabraja Provinsi Sumatera Barat. Alasan penelitian dilakukan di Korem 032 di Sumatera Barat karena peneliti berusaha memahami realitas profesionalisme militer secara konteks sosial di Sumatera Barat dan Korem 032 Wirabraja adalah institusi tertinggi Angkatan Darat di Sumatera Barat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹¹ Sedangkan data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau

¹⁰ Lexi J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹¹ Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.

data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.¹² Karena data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.¹³

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Pembentukan Korem 032 Wirabraja dan Dinamikanya

Sebelum menjadi Korem 032 Wirabraja dahulunya adalah Kodam III/17 Agustus. Kodam III/17 Agustus didirikan di Wilayah Sumatera Barat versi TNI dalam rangka menjaga keamanan dan mempertahankan daerah dari serangan pemberontak. berdasarkan SKep Kasad Nomor skep 265/4/1959 tanggal 15 april 1959¹⁴ bertepatan dengan peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Sumatera Barat. Setelah 25 tahun bertugas Kodam III/17 Agustus kemudian berganti nama dengan Wirabraja sesuai dengan surat

Keputusan Kasad No. Kep/30/I/1985 tanggal 22 Januari 1985 dan surat perintah Pangdam III/17 Agustus No. Sprin/91/I/1985 tanggal 23 Januari yang Makoremnya berkedudukan di Kota Madya Padang¹⁵. Mulai saat itu resmilah berdirinya Korem 032/ Wirabraja yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Kodam I Bukit Barisan yang baru.

Sejak berdiri Korem 032 dari tahun 1985 sampai tahun 2013 telah 17 orang yang memimpin Korem 032 Wirabraja untuk pertama kali dipimpin oleh putra daerah Sumatera Barat yaitu Kolonel Inf. Drs. Amrin. Bagi perwira menengah yang berasal dari Sumatera Barat yang bertugas di Korem 032 Wirabraja berindikasi bahwa Mabes TNI angkatan darat mempercayai putra daerah Sumatera Barat mampu memimpin daerahnya sendiri.

Tata Kelola Lingkungan di Korem 032 Wirabraja

Karakter bersih dan rapi ini akan terlihat ketika kita masuk di lingkungan TNI khususnya Makorem 032 Wirabraja. Hasil observasi penulis di Makorem 032 Wirabraja dari pintu masuk sampai ke halaman paling belakang tidak ditemukan sampah berupa tisu, puntung rokok, plastik atau sampah yang biasa ditemui di tempat-tempat sipil seperti kampus Universitas Negeri Padang khususnya area Pascasarjana yang notabene adalah kaum intelektual

¹²Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

¹³Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Op cit*.

¹⁴Yonif 133/Yhuda Sakti. 2000. *Sejarah Yonif 133/Yhuda Sakti*. Padang: Yonif 133/Yhuda Sakti

¹⁵Korem 032 Wirabraja. 2011. *Sejarah Korem 032 Wirabraja*. Padang: Korem 032 Wirabraja.

yang tertinggi secara pendidikan. Sampah yang ada di Makorem 032 Wirabraja adalah sampah daun kering yang gugur itupun disiang hari karena paginya telah dibersihkan.

Militer di Korem 032 Wirabraja mempunyai kesadaran penanggulangan sampah yang tinggi baik secara lembaga ataupun secara individu, ketika penulis masuk ke ruangan para Pamen atau ruangan tunggu yang menjadi informan penulis, tidak ada abu rokok ataupun debu di atas meja, atau tisu yang berserakan di lantai. Ruangan perwira menengah sangat sederhana jauh dari kemewahan kecuali ruangan komandan Korem, tetapi kebersihan dan kerapiannya membuat tempat itu nyaman.

Kesadaran akan penanggulangan sampah ini memang penting. Adanya petugas kebersihan khusus yaitu satuan yang bertanggung untuk kebersihan dan kerapian Korem 032 Wirabraja yaitu bagian barak, bagian ini terletak di belakang Korem 032 di dekat kantin Korem 032 Wirabraja. Bagian ini selalu sibuk setiap hari mulai membersihkan bagian luar Korem seperti halaman, jalan-jalan, taman-taman, memperbaiki bagian-bagian bangunan rusak, dan mengecat, sedangkan kebersihan ruangan adalah tanggung jawab masing-masing satuan. Cat di Korem 032 Wirabraja terlihat selalu baru hal ini dilakukan oleh bagian barak, sehingga dari luar Korem selalu terlihat indah.

Prajurit Tidak Suka Membaca

Di Korem 032 Wirabraja terdapat pustaka yaitu dari ruang pos

penjagaan untuk umum belok kiri dan sesudah ujung bangunan belok kanan, di dekat bagian penerangan. Pustaka yang ada di Korem tersebut cukup lengkap, penulis terkejut karena ada buku Harold Crouch yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia* yang pada tanggal 31 Mei tahun 1986 ditarik dari peredaran oleh pemerintah Orde Baru. Buku itu berisikan kritikan terhadap pemerintahan militer yang berkuasa waktu itu.

Ketika penulis memasuki pustaka ada seorang tentara yang bertugas jaga di pustaka, petugas tersebut main game sendiri karena mungkin bosan karena sendirian. Lalu penulis mengisi buku tamu yang sediakan; penulis melihat nama penulis yang pertama. Di halaman sebelumnya hanya ada satu dan dua nama tentara yang berkunjung ke pustaka tersebut dan beberapa hari sebelumnya kosong.

Selama penulis membaca buku di perpustakaan tersebut dan menjadi kegiatan rutin penulis ketika ada jadwal wawancara dengan perwira menengah. Dalam menunggu penulis sering ke pustaka dan tidak pernah penulis temukan ada tentara meminjam buku atau membaca buku bersama penulis di ruangan pustaka tersebut. Sepinya pustaka di Korem 032 Wirabraja mengidentifikasi minat baca tentara khususnya anggota Korem 032 Wirabraja sangat rendah. Berdasarkan pengamatan penulis dengan sepiya pustaka Korem 032 Wirabraja dapat diidentifikasi minat baca tentara khususnya anggota Korem 032 Wirabraja sangat rendah.

Bahasa Militer

Studi tentang bahasa militer tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menempatkan studi bahasa dalam kerangka berpikir bahwa bahasa adalah sebagai fakta sosial. Bahasa merupakan alat komunikasi terpenting bagi manusia dalam interaksi sosial. Dengan menggunakan bahasa, manusia berusaha untuk menjaga kebersamaan dan komunitasnya atas berbagi informasi, sikap, gagasan, dan saling memahami.

Bahasa komandan kepada anak buahnya mempunyai sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik, yaitu bahasa-bahas yang memiliki karakteristik seperti: (1) lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, (2) menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, (3) sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, (4) menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, (5) tidak menghendaki saran, usul, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, (6) komunikasi hanya berlangsung searah. Kata-kata yang biasa digunakan oleh komandan terhadap bawahannya adalah seperti *pahami, laksanakan, diperintahkan, kerjakan*. Sedangkan bahasa anak buah kepada komandannya adalah *siap laksanakan komandan, mohon arahan, mohon ijin, siap salah komandan*. Ungkapan tersebut menjadi sebuah kelaziman untuk diucapkan bagi seluruh personil yang ada di Korem 032 Wirabraja baik sipil, apalagi militer.

Identitas Militer menurut Perwira Menengah

Secara sederhana militer digambarkan sebagai organisasi yang di lengkapi persenjataan dan memiliki tanggung jawab serta bertugas mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan musuh baik dari luar maupun dalam negara. Selain dari itu militer juga disebut sebagai *raison d'entre* untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (*emergency organization*) yang bercirikan organisasi keras, ketat, hirarkhis sentralistis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando. Yang dimaksud dengan *emergency organization* adalah sebagai alat/kekuatan pertahanan keamanan untuk menghadapi, mengendalikan dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan bersenjata dari pihak-pihak lain yang mengancam negara, kedaulatan, dan integrasi wilayah. Dalam kemiliteran dibangunlah budaya militer yaitu *habit formation*, *habit formation* dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mutlak perlu agar tugas dapat terlaksana dalam keadaan bagaimanapun¹⁶.

Profesionalisme Militer

Profesionalisme militer tidak lahir dari ruang hampa tapi perjalanan panjang pencarian jati diri TNI, terlepas pencarian jati diri itu adalah

¹⁶Lihat Hasnan Habib. *ABRI dan Demokratisasi Politik*, dalam Cholisin. 2002. *Militer dan Gerakan Prodemokrasi Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

keinginan internal TNI atau desakan politik dari luar TNI yang memaksa TNI khususnya TNI AD menjadi militer profesional.

Secara keseluruhan pemikiran utama tentang profesionalisme TNI khususnya TNI AD diwarnai oleh pandangan yang meliputi tiga dimensi waktu yaitu masa sekarang dan masa depan dengan pengertian bahwa masa sekarang sebagai akibat masa lalu dan menentukan masa mendatang. Berbagai koreksi dan evaluasi tentang hasil perubahan lingkungan akan terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Upaya pembinaan yang bersifat konseptual sebagai realitas objektif terus dikembangkan untuk terciptanya TNI yang profesional. Nilai-nilai dasar keprjurititan menjadi norma dasar bagi prajurit untuk bersikap, berucap dan bertindak sebagai prajurit TNI profesional.

Profesionalisme militer dalam pemahaman perwira menengah Korem 032 Wirabraja mempunyai dua pengertian yaitu profesionalisme militer secara ideologi dan profesionalisme secara teknis. Secara ideologi diatur dalam undang-undang seperti undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sedangkan profesionalisme secara teknis adalah ahli dibidangnya kemampuan memenangkan perang, menghancurkan musuh, mengamankan dan menguasai daerah perang, dan kemampuan militer kewilayahan seperti Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, Kodam.

Lembaga Militer

Pemahaman perwira menengah militer di Korem 032 Wirabraja jelas

mengisyaratkan bahwa lembaga militer berfungsi sebagai lembaga pertahanan. Tetapi menurut subjek penelitian ketika militer berperan di luar pertahanan itu hanya kesalahan militer dari sudut pandang sipil atau masyarakat umum. Kesalahan militer tersebut adalah fungsi militer di luar pertahanan. Fungsi militer di luar pertahanan di zaman pemerintahan Soeharto dikenal dengan Dwifungsi ABRI yang diatur oleh undang-undang dengan jelas. Ketika ada yang menyimpang maka yang menyimpang itu adalah pribadi-pribadi, karena menurut hasil penelitian, masih banyak secara personil perwira menengah dan perwira tinggi yang tidak menyalahgunakan jabatannya di zaman Orde Baru ataupun saat sekarang. Karena dalam pelaksanaan peran ABRI didasarkan pada beberapa undang-undang atau ketetapan MPR yang menjadi landasan legal formal yang berlaku. Bagi perwira menengah di Korem 032 Wirabraja lembaga militer tidak pernah salah yang salah adalah individunya.

Identitas dan Tanggung Jawab Perwira Militer

Dalam pemahaman ideal subjek penelitian perwira adalah orang yang mampu menjadi seorang guru, komandan, teman seperjuangan, dan seorang hakim. Dalam pemahaman ideal subjek penelitian perwira mampu menjadi guru maksudnya adalah bahwa seorang perwira harus memiliki perilaku yang bisa dicontoh dan ditiru oleh bawahannya, juga kemampuan untuk mengembangkan bawahan secara utuh. Oleh karena itu

maka perwira hendaknya menguasai berbagai hal sebagai kompetensi dasar dalam kemiliteran. Ketika perwira bertempur maka dia menguasai taktik, cara menembak, cara menggunakan peralatan perang seperti radio, tank baja dan lain sebagainya. Perwira sebagai guru bermakna berperan dalam pembentukan sumberdaya manusia militer yang potensial di bidang militer untuk pembangunan bangsa dan negara, terutama di sekolah-sekolah militer seperti Akmil (akademi militer), Wamil, Secaba (sekolah calon bintara), Secata (sekolah calon tamtama).

Perwira sebagai komandan adalah seorang yang mampu memberikan perintah dan dipatuhi oleh anak buahnya. Komandan ini menjelaskan hirarki kekuasaan dalam militer yang mempunyai hak veto dalam penentuan kebijakan dan tidak boleh membantah apapun bentuk perintahnya; anak buahnya harus melaksanakannya. Kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang dinamakan komandan regu, komandan pleton, dan komandan kompi.

Perwira sebagai teman seperjuangan adalah orang yang mampu berbaur dengan anak buahnya sehingga terjadi keakraban, seperti makan bersama anak buah, bahu membahu di medan pertempuran, dan di luar tugas dengan bermain bulu tangkis dan bola kaki bersama-sama anak buah.

Perwira sebagai hakim adalah seorang perwira harus mampu menghukum anak buahnya ketika melakukan kesalahan. Ketika anak buah melakukan kesalahan dihukum mulai dari hukuman berbentuk fisik, mental,

diturunkan pangkatnya, tidak naik pangkat, hukuman penjara di penjara militer, sampai pada pemecatan.

Profesionalisme Militer Dilihat dari Karir Terbaik Militer Putra Daerah Sumatera Barat.

Perjalanan militer dalam kesejarahan Minangkabau atau Sumatera Barat memberikan kontribusi yang jelas mulai dari pusat pendidikan Angkatan Darat Jepang, yaitu Giyugun, perang sebelum kemerdekaan, dan perang sesudah kemerdekaan sampai saat ini, sehingga TNI putra daerah Sumatera Barat mempunyai kapasitas yang sama. Namun permasalahannya adalah karir terbaik putra Sumatera Barat berakhir di bintang tiga atau Letnan Jenderal dalam realitas sosial kemiliteran. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator, *pertama* kompetensi pribadi, *kedua* rekomendasi sosial kemasyarakatan, *ketiga* peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)

a. Kompetensi Pribadi

Untuk mencapai jabatan di TNI AD khususnya harus memiliki kemampuan yang baik dan selalu memperbaiki kualitas pribadi. Salah satu penilaian terhadap kualitas pribadi terlihat dari penugasan terhadap personil tentara tersebut dan keberhasilan tugas.

Untuk mencapai pangkat kolonel dari pangkat letnan dua di TNI AD harus menempuh beberapa kali pendidikan yaitu Suslapa 1, Suslapa 2, Seskoad, dan Sesko TNI. Setelah itu baru mendapatkan kesempatan menjadi Letnan Jenderal sampai Jenderal bintang 4 dengan

menjabat pada posisi tertentu seperti komandan Kodam, Kasad atau di Mabes TNI. Menurut Kolonel Inf. Amrin bahwa kenapa orang Minangkabau atau Sumatera Barat belum ada yang memimpin TNI AD (Kasad) atau mencapai Jenderal bintang 4. Subjek penelitian, Kolonel Inf. Drs Amrin, mengatakan:

Tidak ada orang Sumatera Barat memimpin TNI dan hanya sampai bintang tiga (Brigjen) adalah masalah kualitas; Saya sudah 27 tahun dinas tidak mendengar dari pimpinan pusat atau kawan-kawan di militer bahwa orang Sumatera Barat tidak bisa jadi pimpinan TNI karena dikaitkan dengan masalah asal daerah dan PRRI.

Menurut subjek penelitian kualitaslah yang menentukan karir seorang tentara bukan pada asal daerah ataupun kejadian masa lalu. Menurutnya belum ada kualitas orang Sumatera Barat yang mampu sampai ke jenderal bintang 4, faktanya orang Sumatera Barat hanya sampai bintang 3 brigadir jenderal.

b. Rekomendasi Sosial Kemasyarakatan

Putra daerah Sumatera Barat belum mencapai pangkat tertinggi di militer yaitu jenderal bintang 4 karena tidak adanya rekomendasi dari masyarakat baik secara bersama maupun secara individu. Menurut Mayor Destrio Elvano:

Korem di Sumatera Barat harus menjadi Kodam, karena membawahi 10 Kodim dan 2 satuan tempur dan wilayah yang luas. Karena biasanya satu Korem

membawahi 4 atau 5 Kodim, dan 2 Korem layak menjadi satu Kodam. Ketika ada komandan Korem berasal dari Sumatera Barat maka dukungan dan rekomendasi dari masyarakat menjadi penting, seperti contoh Kapolri Bintang satu, Laktamal bintang satu harusnya komandan Korem bintang satu. Wilayah Laktamal lebih kecil dan anggotanya juga sedikit. Ketika ada keadaan darurat dan bencana yang bertanggung jawab adalah komandan Korem. Ketika ada desakan dari masyarakat maka komandan Korem bisa bintang satu atau menjadi Kodam, dari kami (tentara) tidak mungkin desakan itu karena kami sebagai tentara harus menerima apa adanya dan tidak boleh protes karena begitu dogmanya.

Makorem 032 Wirabraja mempunyai wilayah kerja yang luas, yaitu sepuluh Kodim dan 2 satuan tempur. Ini sebenarnya sudah layak dijadikan Kodam, sehingga akhirnya mendapatkan fasilitas militer sesuai dengan ketentuan Kodam. Dengan adanya putra daerah yang menjadi komandan Makorem sebenarnya adalah kesempatan untuk meminta ke pusat (Kasad atau Pangab) oleh masyarakat dan tokoh masyarakat menjadikan Kodam sehingga juga membantu karir putra daerah.

Kapolda (kepala kepolisian) dan Laktamal adalah jabatan yang setingkat memiliki pimpinan perwira tinggi Letnan Jenderal atau bintang satu, sedangkan komandan Korem hanya kolonel. Seharusnya dengan wilayah yang setara pangkat yang memimpin harusnya sama sehingga ada kesetaraan. Namun subjek

penelitian melihat bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak mempunyai dukungan terhadap pengusulan permasalahan Makorem menjadi Kodam ataupun dukungan terhadap putra daerah yang berkarir di militer. Subjek penelitian tidak bisa melakukan ini karena tentara harus patuh dan taat pada keputusan pimpinan.

Menurut subjek penelitian bahwa masyarakat secara organisasi kemasyarakatan dan pribadi tidak ada mendukung sama sekali, masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau bersikap tidak peduli. Ketika ada putra daerah Sumatera Barat yang memiliki jabatan-jabatan strategis di pusat kekuasaan juga tidak ada kepeduliannya.

c. PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)

Selain masalah kompetensi pribadi dan tidak adanya rekomendasi sosial kemasyarakatan bagi sebahagian perwira menengah di Korem 032 Wirabreja tidak adanya orang Sumatera Barat mencapai pangkat Jendral penuh atau bintang 4 adalah karena alasan politis PRRI. Menurut Mayor Destrio Elvano:

Dengan adanya peristiwa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), mungkin menyebabkan putra Sumatera Barat tidak mendapatkan rekomendasi menjadi bintang 4, karena peristiwa PRRI menjadi sebuah legenda memilukan.

Menurut subjek penelitian peristiwa PRRI adalah sebuah peristiwa besar yang menguncang Indone-

sia yang berpusat di Sumatera Barat. Peristiwa PRRI bagi pemerintah pusat adalah pemberontakan. PRRI/Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi merupakan pemberontakan yang paling berbahaya, karena mendapat dukungan dari pihak Amerika dan Inggris¹⁷. Dengan adanya peristiwa PRRI khusus bagi putra daerah Sumatera Barat yang berkarir di bidang militer telah memutuskan karir mereka di bidang militer secara keseluruhan karena umumnya perwira militer yang berasal dari Minangkabau terlibat PRRI.

Pemerintah pusat pada waktu itu mengambil kebijakan mendatangkan pejabat dan tentara Jawa tumpah ke sini (Sumatera Barat) selama dan sesudah pemberontakan... dengan orang Jawa menduduki hampir semua pos senior di kantor gubernur (Gubernur orang Minang) militer dan kepolisian, dan orang Sumatera Barat melihat diri mereka sebagai warga negara kelas dua¹⁸.

E. Penutup

Negara Indonesia adalah sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai subsistem, dan subsistem-subsistem tersebut mengambil peran dan fungsinya masing-masing. Namun di awal Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, subsistem-subsistem tersebut saling tumpang tindih secara peran

¹⁷Lihat Audrey Kahin dan George Mc. Turnan Kahin. 2000. *Subversi Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Grafiti; R.Z. Leirissa. 1991. *PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Grafiti.

¹⁸ *Ibid*

dan fungsi. Pembinaan sistem bernegara bermuara pada tidak tumpang tindihnya subsistem-subsistem tersebut.

Subsistem yang dahulunya memainkan banyak peran dan fungsi adalah tentara mulai dari fungsi pertahanan, keamanan, sosial, politik, dan ekonomi. Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 34 tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada akhirnya menjadikan tentara sebagai subsistem pertahanan. Ketika tentara hanya berperan di bidang pertahanan harus dilihat sebagai spesialisasi, efisiensi dan efektifitas bernegara bukan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu tentara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asren Nasution. 2003. *Religiusitas TNI Refleksi Pemikiran Jenderal Besar Soedirman*. Jakarta: Prenada Media.
- Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Hasnan Habib. *ABRI dan Demokratisasi Politik*, dalam Cholisin. 2002. *Militer dan Gerakan Prodemokrasi Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Indo Barometer. 2011. *Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono*. Jakarta: Indo Barometera.
- Korem 032 Wirabraja. 2011. *Sejarah Korem 032 Wirabraja*. Padang: Korem 032 Wirabraja.
- Kusnanto Anggoro. 2008. *Pengantar Profesionalisme Militer, Profesionalisasi TNI*. Malang: UMM Press.
- Lexi J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lihat Audrey Kahin dan George Mc. Turnan Kahin. 2000. *Subversi Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Perlmutter, Armos. 1985. *Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R.Z. Leirissa. 1991. *PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Reid J.S Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Salim Said. 2006. *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Soebijono. 1997. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yonif 133/Yhuda Sakti. 2000. *Sejarah Yonif 133/Yhuda Sakti*. Padang: Yonif 133/Yhuda Sakti